
Pendekatan Strategis Manajemen Kurikulum Untuk Peningkatan Mutu Pembelajaran Di Era Merdeka Belajar

Ibrahim¹⁾, Alin Amanda²⁾, Egi Riswandi³⁾, Syifa Al Fadhilah⁴⁾

¹²³⁴⁾Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan.

Email: ibrahim_uin@radenfatah.ac.id
aalinamanda@gmail.com
egiwandiris@gmail.com
syifaalfadhilah15@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pendekatan strategis dalam manajemen kurikulum sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran di era Merdeka Belajar. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka sistematis (Systematic Literature Review) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku referensi, serta dokumen resmi kebijakan pendidikan yang relevan dengan topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa manajemen kurikulum strategis menekankan pada kemampuan sekolah dalam melakukan analisis konteks lokal, menyusun Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang adaptif, memberdayakan guru sebagai perancang pembelajaran, serta membangun kolaborasi aktif dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, pengelolaan transisi kurikulum melalui tahapan penyiapan, pelaksanaan, dan evaluasi berkelanjutan menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Dengan pendekatan strategis tersebut, kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai instrumen utama untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang relevan, bermakna, dan berorientasi pada penguatan kompetensi serta karakter peserta didik sesuai Profil Pelajar Pancasila.

Kata Kunci: Manajemen Kurikulum Strategis, Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, Mutu Pembelajaran, Pendidikan Indonesia

Abstract

This study aims to examine in-depth the strategic approach to curriculum management as an effort to improve the quality of learning in the Merdeka Belajar era. The method used is a systematic literature review with a qualitative descriptive-analytical approach. Data sources were obtained from scientific journals, reference books, and official education policy documents relevant to the research topic. The results of the study indicate that strategic curriculum management emphasizes the school's ability to analyze the local context, develop an adaptive Educational Unit Operational Curriculum (KOSP), empower teachers as learning designers, and build active collaboration with various stakeholders. Furthermore, managing the curriculum transition through the stages of preparation, implementation, and ongoing evaluation is a key factor in the successful implementation of the Merdeka Curriculum. With this strategic approach, the curriculum functions not only as an administrative document but also as a primary instrument for improving the quality of learning that is relevant, meaningful, and oriented towards strengthening student competencies and character in accordance with the Pancasila Student Profile.

Keywords: Strategic Curriculum Management, Merdeka Curriculum, Merdeka Belajar, Learning Quality, Indonesian Education

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat pesat, proses pendidikan melahirkan ide-ide kreatif, dan inovatif dalam menghadapi perkembangan zaman. Pemerintah dan satuan pendidikan berusaha sebaik mungkin menyiapkan proses pembelajaran untuk peserta didik di sekolah. Sekolah merupakan tempat peserta didik mendapatkan pendidikan secara formal, sehingga dalam proses pembelajaran harus dipersiapkan sebaik mungkin untuk menghasilkan jiwa-jiwa yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan digital (Yani et al., 2023). Lembaga pendidikan di

Indonesia banyak ditandai dengan berbagai problematika seperti rendahnya manajemen sekolah, sehingga lembaga pendidikan memerlukan badan yang mempunyai tipe perencanaan yang tidak sekedar untuk merespon perubahan yang diperkirakan akan terjadi di masa depan.

Kurikulum merupakan sebuah peta yang kemudian dijadikan kompas dalam proses belajar mengajar terlepas dari bagaimana cara pendidik mengajar, namun tidak dikesampingkan bahwa kurikulum merupakan langkah kongkret dalam membentuk watak dan sikap anak didik. Perkembangan iman dan ketakwaan anak didik merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka menciptakan insan Indonesia yang pancasilais dan memiliki kemauan mengindonesiakan Indonesia dalam arti cinta dan menghargai akan keragaman budaya dan bahasa, pemerintah pendidikan kelebihan power memikirkan mencerdaskan kehidupan bangsa hanya pada, di mana seorang pemimpin itu berasal atau dia tinggal (Arif Munandar, 2017). Maka negara juga harus memikirkan bagaimana keberadaan (sarana dan prasarana) pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terluar, terpinggir), karena Bumi Pancasila tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang atau kelompok, tapi dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia yang rindu akan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan pengembangan Kurikulum 2013 Revisi ke Kurikulum Merdeka didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tertanggal 10 Februari 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Keputusan dari Kemendikbud Ristek di atas menjadi dasar dan payung hukum serta rujukan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang diterapkan pada sekolah-sekolah, madrasahmadrasah, serta institusi-institusi atau lembaga-lembaga pendidikan yang berada di Indonesia. Manajemen Kurikulum Tradisional beroperasi sebagai sebuah birokrasi pasif yang hanya menunggu arahan.

Sementara itu, Manajemen Kurikulum Strategis di era Merdeka Belajar menuntut satuan pendidikan untuk bertindak sebagai agen perubahan aktif yang mampu menganalisis lingkungan, membuat keputusan strategis yang otonom, dan mengelola kurikulum sebagai alat untuk mencapai peningkatan mutu pembelajaran yang spesifik dan relevan. Strategi umumnya berisi rencana atau petunjuk untuk bertindak demi mencapai sasaran yang telah ditentukan. Meskipun Kurikulum Merdeka memberikan otonomi dan fleksibilitas, perubahan paradigma ini menimbulkan tantangan besar dalam aspek pengelolaan. Kurikulum yang fleksibel membutuhkan Manajemen Kurikulum yang tidak lagi bersifat administratif rutin, melainkan harus bersifat strategis.

Manajemen kurikulum strategis didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan evaluasi kurikulum yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada pencapaian visi dan misi jangka panjang sekolah, selaras dengan tujuan Merdeka Belajar. Kesenjangan utama terletak pada transisi pengelolaan. Banyak satuan pendidikan masih menerapkan model manajemen kurikulum yang kaku (*top-down*) dan tidak siap menghadapi tuntutan adaptasi cepat dan pengambilan keputusan otonom yang diwajibkan oleh Kurikulum Merdeka. Jika manajemen kurikulum tidak diselenggarakan secara strategis, otonomi yang diberikan justru berpotensi menimbulkan ketidakseragaman mutu, kebingungan implementasi di tingkat guru, dan gagalnya pencapaian tujuan pembelajaran yang relevan.

Terdapat beberapa pendekatan yang diterapkan guna meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain: Pengembangan kurikulum yang meliputi teknik pembelajaran serta keseluruhan sistem pendidikan, Penyediaan materi pelajaran dasar bagi siswa, panduan untuk pengajar di tingkat dasar dan menengah, sumber ajar teknis dan kejuruan untuk institusi yang membutuhkannya, serta literatur untuk koleksi perpustakaan dalam beragam disiplin ilmu pendidikan tinggi (Dalillah, Aupi & Syaifudin, 2025). Pengadaan perangkat pembelajaran dan sarana pendidikan lainnya untuk sekolah dasar, taman kanak-kanak, sekolah luar biasa, laboratorium sains di tingkat menengah pertama dan atas, infrastruktur serta peralatan untuk

praktik dan pelatihan di sekolah vokasi dan teknik, serta fasilitas lab di berbagai sektor pendidikan tinggi.

Dalam konteks Indonesia, upaya berkelanjutan untuk peningkatan mutu pembelajaran menjadi imperatif nasional, terutama dalam menghadapi dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang semakin pesat di abad ke-21. Mutu pembelajaran tidak lagi diukur semata-mata dari hasil kognitif, tetapi juga dari kemampuan peserta didik untuk mengembangkan kompetensi esensial, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, serta karakter sesuai Profil Pelajar Pancasila. Menyadari tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan ini mewakili transformasi fundamental dalam sistem pendidikan, yang salah satunya ditandai dengan implementasi Kurikulum Merdeka.

Kurikulum Merdeka mengusung paradigma baru yang menekankan pada fleksibilitas, otonomi satuan pendidikan, dan fokus pada materi esensial agar guru dan siswa memiliki ruang lebih besar untuk eksplorasi dan pendalaman kompetensi. Filosofi utama Kurikulum Merdeka adalah membebaskan proses pembelajaran dari rigiditas regulasi, sehingga mampu beradaptasi dengan kebutuhan belajar siswa yang beragam dan konteks lokal sekolah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada pentingnya pergeseran model manajemen kurikulum. Penelitian ini akan melakukan kajian literatur mendalam untuk mengidentifikasi dan merumuskan pendekatan strategis yang paling efektif dalam mengelola, mengembangkan, dan mengevaluasi kurikulum di lingkungan sekolah yang menerapkan Merdeka Belajar. Dengan menganalisis berbagai model teoritis dan praktik terbaik (*best practices*) yang ada dalam literatur, diharapkan dapat ditarik benang merah mengenai komponen-komponen kunci yang harus ada dalam manajemen kurikulum strategis, sehingga secara nyata mampu meningkatkan mutu pembelajaran dan mengoptimalkan potensi yang ditawarkan oleh Kurikulum Merdeka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) yang bersifat deskriptif-analitis. Metode ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam konsep dan praktik manajemen kurikulum strategis dalam konteks peningkatan mutu pembelajaran di era Merdeka Belajar melalui sintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan. Data penelitian berupa data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal nasional terakreditasi (SINTA), buku referensi akademik, serta dokumen resmi kebijakan pendidikan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur sistematis dengan menggunakan kata kunci tertentu, antara lain manajemen kurikulum, manajemen strategis pendidikan, Kurikulum Merdeka, dan mutu pembelajaran. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kriteria relevansi topik, kredibilitas sumber, serta keterkinian publikasi. Dengan Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*), yang dilakukan melalui tahapan reduksi data, pengelompokan konsep utama, interpretasi tematik, serta sintesis antar temuan penelitian (Jeka et al., 2023). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, dan perbedaan pandangan para ahli terkait manajemen kurikulum strategis. Hasil analisis disajikan secara naratif dan argumentatif untuk membangun kerangka konseptual yang sistematis dan relevan dengan konteks implementasi Merdeka Belajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Implikasi Kurikulum di Era Merdeka Belajar

Kurikulum sebagai program atau rencana, rencana atau program belajar yang juga dikenal sebagai kurikulum potensial dalam bentuk buku pedoman kurikulum yang berisi tentang garis-garis besar program pembelajaran (silabus), dan pengalaman belajar atau kegiatan nyata yakni

program pengalaman belajar peserta didik yang dikenal dengan kurikulum aktual (Yunita, Ahmad Zainuri, Ibrahim, Achmad Zulfi, 2023). Menurut Nugroho (2023) dalam (Tunas et al., 2024) Kurikulum Merdeka adalah sebuah kerangka kurikulum fleksibel yang dirancang untuk mengunggulkan kualitas pembelajaran dengan menyerahkan kebebasan dan kebermaknaan kepada siswa dan guru. Kurikulum fleksibel adalah suatu pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang memungkinkan pembelajaran dapat dilakukan secara berani atau memikat serta menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi.

Konsep otonomi dalam pemanfaatan konten yang relevan dan mudah beradaptasi untuk memenuhi minat, kebutuhan, dan karakteristik siswa ditonjolkan dalam Merdeka Belajar. Fleksibilitas dalam Kurikulum Merdeka merujuk pada keleluasaan yang diberikan kepada satuan pendidikan (sekolah dan guru) untuk menyesuaikan, mengembangkan, dan mengelola kurikulum operasional sesuai dengan kebutuhan, konteks, dan karakteristik unik peserta didik serta potensi daerah setempat. Fleksibilitas dalam Kurikulum Merdeka merujuk pada keleluasaan yang diberikan kepada berbagai pihak untuk menyesuaikan komponen kurikulum agar relevan dengan kebutuhan, minat, dan tahapan perkembangan peserta didik, serta konteks lingkungan (Sholihah, 2023). Prinsip fleksibilitas ini merupakan antitesis dari model kurikulum sebelumnya yang bersifat sentralistik dan seragam di seluruh Indonesia, dan diimplementasikan melalui beberapa aspek utama:

1. Fleksibilitas Konten dan Struktur

Materi pembelajaran disederhanakan dan difokuskan pada materi esensial dan kompetensi dasar. Hal ini memberikan ruang (waktu) yang lebih luang bagi guru untuk mendalami materi, melakukan proyek, dan menerapkan pembelajaran inkuiri, bukan sekadar mengejar cakupan materi yang padat. Sekolah diberikan kebebasan untuk mengatur alokasi jam pelajaran mingguan. Mereka dapat mengintegrasikan beberapa mata pelajaran, mengalokasikan waktu yang lebih banyak untuk mata pelajaran tertentu sesuai kebutuhan, atau mengatur blok waktu khusus untuk kegiatan proyek.

2. Fleksibilitas dalam Pembelajaran (Pedagogi)

Guru diizinkan, bahkan didorong, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ini berarti menyesuaikan metode, materi, dan asesmen berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar (gaya belajar) masing-masing peserta didik, alih-alih menggunakan pendekatan *one-size-fits-all*. Kurikulum secara eksplisit mengalokasikan waktu khusus untuk pembelajaran berbasis proyek. Sekolah fleksibel memilih topik proyek, menentukan alur pelaksanaan, dan mengintegrasikannya dengan isu-isu lokal yang relevan (misalnya: kearifan lokal, lingkungan, kewirausahaan) (Sholihah, 2023).

3. Fleksibilitas dalam Pengembangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP)

Satuan pendidikan memiliki otonomi penuh untuk mengembangkan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP). KOSP ini adalah adaptasi dari kerangka kurikulum pusat yang disesuaikan dengan visi, misi, dan sumber daya sekolah. Proses ini melibatkan partisipasi aktif guru dan *stakeholder* lokal. Guru diberikan kebebasan untuk memilih dan mengembangkan sumber belajar yang sesuai dan kontekstual, tidak terikat hanya pada satu buku teks baku. Kurikulum operasional adalah rancangan kurikulum yang digunakan di setiap satuan Pendidikan sebagai pedoman untuk sebuah proses pembelajaran (Najah & Putri, 2024). Kurikulum ini merupakan implementasi dari kurikulum merdeka yang mencakup berbagai komponen dalam kurikulum operasional seperti, karakteristik satuan Pendidikan, tujuan, visi, misi, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum operasional mencakup keseluruhan rencana serta kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah.

Terdapat perbedaan dalam penerapan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka, dilihat dari rumitnya beban belajar siswa, dimana siswa merasa lebih nyaman belajar pada kurikulum

merdeka ini seperti dengan adanya program Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Materi yang dalam kurikulum merdeka juga terfokus pada siswa, sehingga guru hanya berperan sebagai pembimbing dan penunjang pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh (Diana et al., 2024) dengan narasumber yakni wakil kepala sekolah bidang kurikulum (Wakakur) di salah satu Sekolah Menengah Atas.

Di dalam penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu tema yang telah diterapkan dalam kurikulum merdeka di sekolah tersebut yaitu Kewirausahaan “Jajanan Daerah”, dan Bhineka Tunggal Ika “Budaya Lokal”. Projek ini merupakan salah satu inovasi dari kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan karakter siswa (Diana et al., 2024). Tema ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi pelajar Indonesia yang cakap, ber karakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, sesuai dengan tujuan bangsa untuk menciptakan generasi yang benar secara moral sesuai dengan ajaran Pancasila.

Berdasarkan analisis penjelasan di atas bahwa Implikasi Kurikulum Merdeka pada Manajemen Kurikulum Strategis dengan Pemberian fleksibilitas ini secara langsung memicu kebutuhan akan Manajemen Kurikulum yang Strategis. Sekolah tidak lagi bisa menunggu instruksi dari pusat, melainkan harus memiliki kemampuan manajerial untuk, Prinsip fleksibilitas dan otonomi yang diusung Kurikulum Merdeka menuntut perubahan fundamental dalam bagaimana kurikulum direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi di tingkat satuan pendidikan.

1. Pergeseran dari Kepatuhan (*Compliance*) ke Adaptasi (*Adaptation*)

Manajemen kurikulum strategis tidak lagi hanya memastikan sekolah menuruti instruksi pusat, tetapi berfokus pada kemampuan sekolah untuk beradaptasi.

- a. Penyusunan KOSP sebagai Inti Strategi: Sekolah harus secara strategis mengelola proses pengembangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP). KOSP menjadi dokumen strategis yang mencerminkan analisis mendalam tentang karakteristik peserta didik, potensi daerah, visi-misi sekolah, dan sumber daya yang tersedia.
- b. Analisis Konteks Lokal yang Wajib: Manajemen harus memprioritaskan identifikasi kebutuhan unik siswa (minat, gaya belajar, kesiapan) dan potensi lingkungan/daerah (misalnya: tema Kewirausahaan “Jajanan Daerah” atau Bhineka Tunggal Ika “Budaya Lokal”).
- c. Indikator Kinerja Baru: Keberhasilan manajemen diukur bukan dari keseragaman, melainkan dari relevansi kurikulum terhadap kebutuhan lokal dan tingkat kebermaknaan pembelajaran bagi siswa.

2. Peningkatan Otonomi Guru dan Pemberdayaan Profesional

Fleksibilitas pedagogi menempatkan guru sebagai ujung tombak strategis.

- a. Manajemen Sumber Daya Manusia (Guru): Fokus manajemen kurikulum harus bergeser pada peningkatan kompetensi guru dalam Pembelajaran Berdiferensiasi. Guru harus mampu merancang metode, materi, dan asesmen yang berbeda untuk kelompok siswa yang berbeda, bukan lagi pendekatan *one-size-fits-all*. Guru tidak lagi hanya menjadi penyampai informasi, tetapi sebagai fasilitator dan pembimbing (*scaffolder*) dalam proses belajar siswa, sejalan dengan konsep guru sebagai penunjang pembelajaran.
- b. Pengembangan Sumber Belajar yang Kontekstual: Manajemen harus memfasilitasi guru untuk mengembangkan atau memilih sumber belajar yang relevan dan kontekstual, melepaskan ketergantungan tunggal pada buku teks baku.

3. Pengelolaan Waktu dan Struktur Konten yang Fleksibel

Manajemen kurikulum strategis memerlukan keahlian dalam mengatur alokasi waktu dan integrasi mata pelajaran.

- a. Pengaturan Blok Waktu yang Efisien: Sekolah perlu secara strategis mengelola alokasi jam pelajaran yang lebih longgar. Ini termasuk memutuskan kapan mengintegrasikan mata pelajaran dan kapan mengalokasikan waktu blok khusus untuk kegiatan proyek (seperti P5).
 - b. Implementasi P5 yang Terstruktur: Manajemen harus merancang P5 (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) sebagai kegiatan yang terintegrasi secara strategis, tidak terpisah. Proyek ini harus dirancang untuk mencapai karakter siswa sesuai nilai Pancasila dan dikaitkan dengan isu-isu lokal yang telah diidentifikasi (seperti contoh Kewirausahaan dan Budaya Lokal).
4. Keterlibatan Stakeholder Lokal yang Intensif
- Otonomi dalam pengembangan KOSP menuntut partisipasi aktif dari seluruh komunitas sekolah dan masyarakat.
- a. Kemitraan Strategis: Manajemen harus membangun kemitraan yang kuat dengan stakeholder lokal orang tua, tokoh masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah, untuk memperkaya kurikulum operasional. Masukan dari mereka sangat penting untuk memastikan proyek dan materi ajar relevan dengan kebutuhan masa depan daerah.
 - b. Pengambilan Keputusan Bersama (*Shared Decision-Making*): Struktur manajemen harus memfasilitasi pengambilan keputusan yang melibatkan guru dan stakeholder lokal dalam menetapkan visi, misi, dan karakteristik pembelajaran sekolah.

Dengan demikian, fleksibilitas Kurikulum Merdeka adalah peluang besar untuk peningkatan mutu, tetapi peluang ini hanya dapat diwujudkan melalui pendekatan strategis dalam manajemen kurikulum di tingkat satuan pendidikan.

Dalam paradigma lama, kurikulum didominasi oleh pendekatan Sentralistik dan *Input-Oriented* (Warni Tune Sumar & Intan Abdul Razak, 2016). Pendekatan ini mengindikasikan bahwa seluruh proses pengembangan kurikulum mulai dari penyusunan materi ajar hingga penetapan kebijakan diatur secara terpusat oleh Pemerintah Pusat dan kemudian diterapkan secara seragam di semua institusi pendidikan di seluruh Indonesia (Afifa et al., 2025). Ciri-ciri dominan dari model kurikulum yang bersifat sentralistik ini:

- a. Otoritas Penuh di Tangan Pemerintah Pusat: Pemerintah Pusat memiliki kendali absolut atas segala elemen kurikulum. Sekolah-sekolah di daerah hanya berfungsi sebagai pelaksana wajib yang harus mengikuti instruksi teknis tanpa pengecualian.
- b. Fokus pada Isi Pelajaran (*Subject-Centric*): Materi ajar didominasi oleh aspek teoretis dan spesifik mata pelajaran. Keterkaitan antara materi tersebut dengan realitas kehidupan sehari-hari siswa atau konteks budaya lokal seringkali diabaikan.
- c. Guru sebagai Sumber Utama Pengetahuan (*Teacher-Oriented*): Proses belajar-mengajar menempatkan guru sebagai figur sentral dan penyalur informasi. Akibatnya, siswa cenderung berperan sebagai penerima pasif yang kurang didorong untuk berinteraksi atau membangun pengetahuannya sendiri.
- d. Membatasi Kreativitas dan Adaptasi Lokal: Kerangka kebijakan yang kaku dan seragam dari pusat sering kali mematikan inisiatif dan inovasi yang seharusnya bisa dikembangkan oleh sekolah atau pendidik di tingkat regional untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan spesifik daerah mereka.

Namun kurikulum yang bersifat Sentralistik ini sudah ber transformasi ke Perencanaan kurikulum yang adaptif dimulai dengan analisis kebutuhan peserta didik, lingkungan sosial, dan tuntutan dunia kerja. Perencanaan yang responsif memastikan kurikulum tetap relevan dengan konteks lokal dan global. Hal ini sejalan dengan teori manajemen kurikulum yang menekankan pentingnya kurikulum berbasis kebutuhan (*needs-based curriculum*). Satuan pendidikan yang berhasil mengimplementasikan kurikulum adaptif melakukan langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan merupakan tahap fundamental dalam pengembangan kurikulum yang efektif dan relevan. Proses ini bertujuan untuk menggali secara mendalam kebutuhan pembelajaran dari berbagai sudut pandang stakeholder, terutama guru, orang tua, dan peserta didik sebagai aktor utama dalam proses pendidikan (Khairunnisa & Nangim, 2025). Diferensiasi Pembelajaran: Kurikulum adaptif mengakui bahwa setiap siswa memiliki kecepatan belajar, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Guru memiliki kebebasan untuk memodifikasi metode, konten, dan produk pembelajaran.

2. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan merupakan aspek krusial dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang adaptif, relevan, dan berkelanjutan. Proses ini tidak hanya melibatkan guru dan tenaga pendidik, tetapi juga memperluas partisipasi kepada komite sekolah, dinas pendidikan, orang tua, serta pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki peran strategis dalam ekosistem pendidikan (Pramesti et al., 2024). Melibatkan komite sekolah dalam penyusunan kurikulum memungkinkan terjadinya dialog konstruktif antara sekolah dan masyarakat. Komite sekolah yang terdiri dari unsur orang tua, tokoh masyarakat, dan wakil sekolah dapat memberikan masukan yang penting terkait kebutuhan peserta didik, karakteristik lokal, dan sumber daya yang tersedia.

Hal ini memastikan bahwa kurikulum yang disusun tidak hanya berbasis standar nasional, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap lingkungan sekitar. Peran dinas pendidikan sangat penting dalam memberikan arahan kebijakan, regulasi, serta sumber daya pendukung. Dinas pendidikan dapat membantu menyelaraskan kurikulum sekolah dengan kebijakan nasional dan daerah, serta menyediakan pelatihan dan supervisi yang diperlukan bagi guru dan tenaga kependidikan. Keterlibatan dinas pendidikan juga menjamin keberlanjutan implementasi kurikulum melalui monitoring dan evaluasi yang sistematis.

Implikasi Terhadap Manajemen Kurikulum dengan Perubahan paradigma ini menciptakan kebutuhan yang mendesak akan Pendekatan Strategis Manajemen Kurikulum. Dalam paradigma seragam, manajemen hanya perlu memastikan kepatuhan. Namun, dalam paradigma adaptif, manajemen harus memastikan:

1. Pengambilan Keputusan Strategis: Sekolah harus mampu menganalisis konteksnya sendiri (SWOT analysis) untuk menentukan adaptasi kurikulum yang paling tepat.
2. Pengembangan Kapasitas Guru: Guru harus dilatih untuk menjadi desainer kurikulum dan fasilitator pembelajaran berdiferensiasi, bukan sekadar pelaksana.
3. Keterlibatan *Stakeholder*: Membangun mekanisme kolaboratif dengan orang tua dan masyarakat untuk memastikan kurikulum yang dirancang benar-benar relevan dengan kebutuhan lokal.

Strategi Implementasi untuk Peningkatan Mutu Pembelajaran

Implementasi kurikulum diwujudkan dalam bentuk pengalaman belajar dengan prinsip-prinsip yang menjadikannya lebih mudah dan lebih efektif untuk dikomunikasikan ke berbagai pihak seperti pimpinan sekolah, pendidik, pengawas sekolah, dan staf pendukung lainnya. Implementasi merupakan bagian dari keseluruhan manajemen kurikulum yang mencakup pengembangan kurikulum (*curriculum development*), implementasi (*implementation*), umpan balik (*feedback*), evaluasi (*evaluation*), modifikasi (*modification*), dan konstruksi kurikulum (*curriculum construction*) (Yunita, Ahmad Zainuri, Ibrahim, Achmad Zulfi, 2023). Dalam praktik langsung implementasi kurikulum di sekolah sering kali mengalami berbagai tantangan. Salah satunya transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka. Salah satu perubahan dalam kurikulum ini adalah sistem penilaian yang beralih dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) menjadi Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP). Selain itu, pendekatan pembelajaran juga lebih bervariasi terutama dengan adanya Proyek Penguatan Profil

Pelajar Pancasila . Dalam hal ini tidak semua pendidik siap menerapkan Kurikulum Merdeka dengan optimal. Tantangan ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas di lapangan.

Strategi Pengelolaan transisi ke Kurikulum Merdeka yang menekankan fleksibilitas dan otonomi memerlukan pendekatan manajemen perubahan yang sistematis, dibagi menjadi tiga fase berurutan: Penyiapan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Berkelanjutan (Cholilah et al., 2023).

1. Fase Penyiapan dan Penyelarasan (Fondasi yang Kuat)

Tahap awal ini merupakan langkah krusial untuk memastikan seluruh komponen sekolah memiliki pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat terhadap perubahan.

- a. Internalisasi Filosofi dan Sosialisasi Mendalam: Manajemen harus memulai dengan melaksanakan diseminasi informasi mengenai filosofi, prinsip dasar, dan tujuan Kurikulum Merdeka. Sosialisasi ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi harus membangun pemahaman mendalam di kalangan guru, staf, dan orang tua mengenai urgensi dan manfaat kurikulum baru.
- b. Diagnosis Konteks dan Analisis Situasi: Langkah strategis berikutnya adalah melakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi spesifik sekolah, termasuk kebutuhan siswa, potensi daerah, serta tantangan internal. Hasil analisis ini akan menjadi landasan untuk adaptasi kurikulum yang relevan.
- c. Pembentukan Tim Penggerak: Untuk mengelola kompleksitas transisi, perlu dibentuk Tim Implementasi Inti. Tim ini bertanggung jawab merencanakan, mengorganisir, dan mengawasi jalannya proses transisi di seluruh unit sekolah.
- d. Penyelarasan Visi dan Misi Sekolah: Manajemen harus merevisi dan menyelaraskan visi, misi, dan tujuan sekolah agar secara eksplisit mencerminkan nilai-nilai Kurikulum Merdeka, seperti kemandirian, kreativitas, dan inovasi, dengan melibatkan semua *stakeholder*

2. Fase Pengembangan Kapasitas dan Aksi Kelas

Fokus utama pada fase ini adalah meningkatkan kompetensi praktis guru dan memastikan ketersediaan perangkat ajar yang relevan untuk implementasi di ruang kelas.

- a. Penguatan Kompetensi Guru yang Berkelanjutan: Manajemen wajib menyelenggarakan pelatihan profesional dan bimbingan teknis (Bimtek) yang terfokus. Pelatihan ini harus spesifik pada keterampilan kunci, seperti; Memahami dan menerjemahkan Capaian Pembelajaran (CP), Mengembangkan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Ajar, Menguasai Pembelajaran Berdiferensiasi untuk melayani keberagaman siswa dan Mengimplementasikan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
- b. Pemanfaatan Platform Digital: Guru didorong untuk secara aktif memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) sebagai sumber belajar utama, *tool* pengembangan profesional, dan wadah kolaborasi.
- c. Kemandirian Pengembangan Perangkat Ajar: Sekolah harus memfasilitasi guru untuk secara mandiri atau kolaboratif mengembangkan perangkat ajar yang kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan unik siswa di sekolah tersebut, tidak lagi terikat hanya pada satu buku teks baku.
- d. Fleksibilitas Model Implementasi: Sekolah diberikan keleluasaan untuk memilih jalur implementasi yang sesuai dengan tingkat kesiapan mereka (Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, atau Mandiri Berbagi), memastikan transisi berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

3. Fase Pemantauan dan Keberlanjutan

Keberhasilan transisi ditentukan oleh adanya sistem pemantauan yang kuat, dukungan internal-eksternal, dan budaya belajar yang berkelanjutan (Firza et al., 2025).

- a. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Proaktif: Manajemen harus menetapkan sistem pemantauan rutin dan evaluasi formatif yang bertujuan mengidentifikasi hambatan implementasi di kelas secara dini. Temuan dari monev ini harus segera ditindaklanjuti dengan solusi korektif.
- b. Memperkuat Dukungan Eksternal: Strategi ini mencakup upaya aktif untuk menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan, pengawas, dan mitra eksternal lainnya. Dukungan ini penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya, kebijakan yang suportif, serta *coaching* profesional.
- c. Pelibatan Orang Tua dan Masyarakat: Melibatkan orang tua dan masyarakat bukan sekadar sosialisasi, tetapi sebagai mitra aktif dalam proses pembelajaran. Mereka perlu memahami perubahan kurikulum agar dapat memberikan dukungan yang selaras di lingkungan rumah dan masyarakat.

Selain itu juga, Pemberian otonomi dan fleksibilitas kurikulum kepada sekolah dan guru di era Merdeka Belajar mensyaratkan adanya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masif. Guru tidak lagi hanya menjalankan kurikulum, melainkan wajib menjadi perancang (*designer*) dan inovator pembelajaran yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan unik setiap siswa. Oleh karena itu, Manajemen Kurikulum Strategis harus menempatkan Pengembangan Profesional Guru (CPD) sebagai investasi utama (subhan, 2022). CPD dalam konteks Kurikulum Merdeka harus bergeser dari pelatihan *one-off* yang bersifat seremonial, menuju model yang berkelanjutan, berbasis masalah riil, dan kolaboratif.

Peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi adalah inti dari keberhasilan Kurikulum Merdeka, sebab guru dituntut untuk melayani kebutuhan belajar yang beragam dari setiap peserta didik. Strategi pengembangan profesional harus fokus pada praktik kolaboratif dan reflektif (Rachmadtullah et al., 2024).

1. Komunitas Belajar Profesional (KBP)

Strategi paling mendasar adalah penguatan Komunitas Belajar Profesional (KBP), yang sering juga disebut *Professional Learning Community* (PLC). KBP harus berfungsi sebagai wadah bagi guru untuk melakukan *peer-coaching* dan refleksi kolektif. Dalam forum ini, guru mata pelajaran yang sama atau serumpun bertemu secara rutin (misalnya, melalui In House Training kecil atau gugus) untuk berbagi tantangan, solusi, dan keberhasilan penerapan diferensiasi konten, proses, dan produk (Kusumawati, 2024). Tujuannya adalah membangun pemahaman bersama dan praktik yang konsisten di seluruh sekolah.

2. Model *Lesson Study*

Penerapan Model *Lesson Study* adalah cara efektif untuk meningkatkan kompetensi pelaksanaan diferensiasi secara langsung di lapangan. Guru secara bersama-sama melalui siklus rencana (merancang sesi berdiferensiasi), lakukan (mengobservasi sesi yang dilaksanakan oleh salah satu guru), dan lihat/refleksikan (diskusi mendalam) (Halim Simatupang, 2018). Fokus observasi adalah bagaimana *engagement* dan *outcome* siswa yang berbeda-beda tercapai. Praktik ini memastikan bahwa pengembangan profesional berbasis pada pengalaman nyata di kelas, bukan hanya teori.

3. Pemanfaatan Platform Teknologi

Guru perlu didorong untuk memanfaatkan Platform Teknologi yang tersedia, seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM), dan sumber daya digital lainnya. Ini bukan sekadar pelatihan *digital literacy*, tetapi mengajarkan guru cara mengkurasi konten digital dan memanfaatkan fitur-fitur yang mendukung personalisasi pembelajaran. Dokumentasi praktik baik dan *microlearning* yang disediakan platform dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan praktis untuk implementasi diferensiasi.

4. Pendekatan *Coaching*

Pendekatan *Coaching* menggantikan model supervisi akademik tradisional. Kepala sekolah atau pengawas bertindak sebagai coach yang memberikan dukungan dan umpan balik yang formatif dan spesifik terhadap praktik diferensiasi guru (Kusumardi, 2023). *Coaching* berorientasi pada peningkatan dan pengembangan profesional individu guru, di mana fokusnya adalah membantu guru menemukan solusi dan meningkatkan kemampuan adaptifnya sendiri, bukan sekadar menilai kepatuhan administrasi.

Strategi yang komprehensif ini bertujuan untuk mengubah guru dari pelaksana menjadi pengembang dan inovator kurikulum, yang merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi Merdeka Belajar dan peningkatan mutu pembelajaran.

KESIMPULAN

Implementasi Kurikulum Merdeka menandai pergeseran paradigma fundamental dalam pendidikan di Indonesia, dari model sentralistik dan seragam menuju model yang menekankan fleksibilitas, otonomi satuan pendidikan, dan adaptasi lokal. Kurikulum yang fleksibel ini menuntut perubahan mendasar dalam pengelolaan kurikulum, dari yang bersifat birokrasi pasif menjadi Manajemen Kurikulum Strategis. Manajemen Kurikulum Strategis didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan evaluasi kurikulum yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada pencapaian visi jangka panjang sekolah, selaras dengan tujuan Merdeka Belajar. Kunci utama dari pendekatan strategis ini adalah kemampuan sekolah untuk:

1. Beradaptasi dan menganalisis konteks lokal untuk menyusun Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang relevan, seperti menyesuaikan tema P5 dengan isu daerah (contoh: Kewirausahaan “Jajanan Daerah”).
2. Mengembangkan Kapasitas Guru secara masif, mengubah guru dari pelaksana menjadi perancang/inovator pembelajaran yang menguasai Pembelajaran Berdiferensiasi dan mampu menerapkan P5 secara terstruktur.
3. Mengelola Transisi melalui tiga fase sistematis (Penyiapan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Berkelanjutan), dengan fokus pada Internalisasi Filosofi Kurikulum Merdeka dan Penguatan Kompetensi Guru.
4. Membangun Kolaborasi intensif dengan *stakeholder* lokal, termasuk orang tua dan masyarakat, untuk memperkaya kurikulum operasional dan memastikan relevansi pembelajaran.

Dengan demikian, peningkatan mutu pembelajaran di era Merdeka Belajar sangat bergantung pada kemampuan manajemen sekolah untuk melakukan transisi dari kepatuhan administratif ke pengambilan keputusan strategis yang adaptif dan berpusat pada kebutuhan unik peserta didik.

REFERENSI

- Afifa, Z., Putri, A. P., Rahmadini, R., & Fajriah, U. (2025). Sejarah Perubahan Kurikulum di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(6), 1551–1565. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i6.8626>
- Arif Munandar. (2017). KURIKULUM SEBAGAI JANTUNG PENDIDIKAN. *Prosiding Seminar Nasional Pendidik Dan Pengembang Pendidikan Indonesia Dengan Tema “Membangun Generasi Berkarakter Melalui Pembelajaran Inovatif”*. Aula Handayani IKIP Mataram, 52–61.
- Cholilah, M., Gratia, A., Tatuwo, P., Rosdiana, S. P., Noor, A., Pgri, U., Buana, A., Pgri, U., Buana, A., Pgri, U., Buana, A., Pgri, U., & Buana, A. (2023). Pengembangan Kurikulum Merdeka Dalam Satuan Pendidikan Serta Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Abad 21. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 01(02), 57–66. <https://doi.org/10.58812/spp.v1.i02>
- Dalillah, Aupi, T. J. I., & Syaifudin, M. (2025). Manajemen Kurikulum sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 19263–19268.
- Diana, A., Chaerly Mirochina, & Badrudin. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka Melalui

- Pembelajaran P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) Dengan Tema Suara Demokrasi Pada Kelas XII SMK Bhakti Nusantara 666. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(September), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13855239>
- Firza, M., Khairina, N., Aziza, N., & Ramadhani, N. A. (2025). Strategi Sekolah dalam Mengatasi Tantangan Masa Transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka di SDN Semangat. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin*, 3(2), 619–629. <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>
- Halim Simatupang, A. (2018). MODEL PENDEKATAN LESSON STUDY UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENGAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH MICROTEACHING. *JURNAL BIOLOKUS*, 1(2).
- Jeka, F., Risnita, Jailani, M. S., & Asrulla. (2023). Kajian Literatur dalam Menyusun Referensi Kunci , State Of The Art , dan Keterbaharuan Penelitian (Novelty). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26466–26474.
- Khairunnisa, A., & Nangim, N. (2025). Strategi Manajemen Kurikulum yang Adaptif dan Inovatif dalam Proses Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Dasar Menengah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 18932–18943.
- Kusumardi, A. (2023). Teknik Coaching Untuk Memahami Karakteristik Siswa Dalam Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Sustainable*, 6(1), 11–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/kjmp.v6i1.3133>
- Kusumawati, E. (2024). Membangun Komunitas Belajar Profesional Guru Melalui Supervisi Akademik Partisipatif oleh Kepala Sekolah Transformasional. *Jayapangus Press Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(4), 267–273. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/cetta>
- Najah, L. H. D. R. W. A. A. E. S., & Putri, K. A. (2024). KURIKULUM OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN: IMPELEMENTASI, STRUKTUR DAN PRINSIP. *Incrementapedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 06, 53–59. <https://doi.org/http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/incrementapedia>
- Rachmadtullah, R., Rusminati, S. H., & Retnosari, I. E. (2024). Peningkatan Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Berdiferensiasi Berbasis Konten. *Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 8–17. <https://doi.org/2987-1301>
- Sholihah, S. I. A. M. A. . H. S. H. (2023). Kurikulum Merdeka : Fleksibilitas Kurikulum bagi Guru dan Siswa. *JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT*, 02(05), 86–92. <https://doi.org/https://jisma.org>
- subhan. (2022). PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MENERAPKAN PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI UNTUK MEWUJUDKAN MERDEKA BELAJAR MELALUI LOKAKARYA DI SMPN 3 PONTIANAK. *Jurnal Pembelajaran Prospektif*, 7(1), 49–94.
- Tunas, K. O., Daniel, R., & Pangkey, H. (2024). Kurikulum Merdeka: Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dengan Kebebasan dan Fleksibilitas. *Journal on Education*, 06(04), 22031–22040.
- Warni Tune Sumar & Intan Abdul Razak. (2016). *Pendekatan ini mengindikasikan bahwa seluruh proses pengembangan kurikulum—mulai dari penyusunan materi ajar hingga penetapan kebijakan—diatur secara terpusat oleh Pemerintah Pusat dan kemudian diterapkan secara seragam di semua institusi pendidikan di se* (Cinthia Mornis sartono (ed.)). Penerbit Deepublish.
- Yani, R., Sri Nurabdiah Pratiwi, Isman, M., & Isman, M. (2023). Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Meningkatkan Kompetensi Siswa SMK Budi Utomo Binjai. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah Dan Tinggi (JMP-DMT)*, 4(2), 205–217.
- Yunita, Ahmad Zainuri, Ibrahim, Achmad Zulfi, M. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *Jambura Journal of Educational Management*, 4(1), 16–25.